

**ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
PENERIMAAN KAS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BERAU**

SAFITRI NURHIDAYATI
safitri.n091183@gmail.com

Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redeb

ABSTRACT

Analysis of Accounting Information System of Cash Receipts at Regional Revenue Office of Berau District. The purpose of this study is to know clearly about the implementation of accounting information system cash receipts in the District Revenue Office of Berau , the method of analysis used qualitative descriptive analysis method.

Based on the results of the analysis can be concluded that rejection of the hypothesis in this study because it is evident that the accounting information system cash receipts at the Regional Revenue Office of Berau District is in accordance with Regulation of Government Number 13 of 2006. There are advantages in the implementation of accounting information system cash receipts, namely: The order is printed and the document has been well archived by the authorized officer.

The use of accounting note is suitable conformity with the existing accounting information standard, which contains a summary of transactions that occurred during a certain period, Therefore, to facilitate the discovery of non-conformity of account balances in the accountancy.

Keywords: *Accountancy Information System, Cash Receipts, District Income*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak diberlakukannya UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dan kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Perubahan sistem pemerintahan dari sistem terpusat menjadi sistem otonomi daerah telah memberi dampak yang besar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan

dan ruang lingkup pada umumnya sehingga, memberi dampak juga pada perubahan pengaturan sistem keuangan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor. PP/58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, memberikan penjelasan lebih lanjut tentang aktivitas yang menjadi tanggung jawab pusat dan provinsi untuk setiap urusan yang telah didesentralisasikan tersebut. Secara umum Pemerintah Pusat hanya bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan

bidang pertahanan keamanan, luar negeri, moneter, fiskal, hukum dan keagamaan. Pemerintah Daerah, utamanya Pemerintah Kabupaten/Kota, bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan lain di luar urusan yang dipegang Pemerintah Pusat, walaupun tidak sepenuhnya.

Tata cara atau prosedur pelaksanaan sistem penatausahaan keuangan daerah sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, mengingat perkembangan volume kegiatan dari tahun ke tahun terus meningkat, samping itu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau selalu berusaha meningkatkan target pencapaian penerimaan daerah yang digolongkan dalam 3 kategori yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain. Untuk itu pelaksanaan sistem penata-usahaan keuangan daerah sangat penting dilaksanakan secara tertib dan taat aturan. Sistem akuntansi keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas dan prosedur akuntansi aset daerah.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam setiap prosedur tersebut adalah fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, laporan yang dihasilkan dan uraian teknis prosedur. Suatu sistem yang baik dan handal tidak hanya memuat aturan-aturan atau prosedur-prosedur yang lengkap dan rinci, namun jauh lebih

penting adalah pada saat penerapannya, apakah sistem tersebut telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan aturan yang telah digariskan.

Rumusan Masalah

Untuk memberikan arahan yang jelas dalam melakukan penelitian ini, maka dirumuskan permasalahan, sebagai berikut: “Apakah sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau telah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006?”

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan jelas mengenai pelaksanaan sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan saran-saran sehubungan dengan sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau serta bahan masukan untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai pelaksanaan sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada instansi pemerintah.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian Teori

1. Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut *American Accounting Association*, adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi

ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut (Soemarso, 2005:5). Sedangkan menurut Jusuf (2001:4-5), akuntansi merupakan suatu proses untuk mencatat, menggolongkan, meringkas, melaporkan dan menganalisa data keuangan dari suatu perusahaan.

Menurut horgren dalam Jusuf (2001:4), akuntansi adalah suatu sistem yang mengukur aktivitas-aktivitas bisnis, memproses informasi tersebut kedalam bentuk laporan dan mengkomunikasikannya kepada para pengambil keputusan.

2. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Bastian (2006:4), yaitu: formulir-formulir, buku-buku catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data yang berhubungan dengan usaha suatu perusahaan dengan tujuan menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi perusahaan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur adalah urutan kegiatan klerikal yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal dan buku besar.

3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

a. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut PP No.24 Tahun 2005 tentang standar akuntansipemerintahan, yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah. Mengutip dari Kepmendagri No.29 Tahun 2002 Pasal 70 ayat (1), sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.

Sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi menurut Halim (2007:42-43) yang digambarkan melalui bagan di bawah ini:

Gambar 1. Siklus Akuntansi Keuangan Daerah



b. Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Halim (2007:28) adalah :

- 1) Pertanggungjawaban
- 2) Manajerial
- 3) Pengawasan

Menurut Gade (2002:112) tujuan sistem akuntansi keuangan daerah adalah:

- 1) Menjaga aset pemerintah dan instansinya melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima umum.
- 2) Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat (daerah), baik secara nasional (daerah) maupun instansi yang berguna sebagai dasar pengukuran kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.
- 3) Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat (daerah) secara keseluruhan.
- 4) Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan

keuangan pemerintah secara efisien.

c. Pelaporan Akuntansi Keuangan Daerah

Sesuai dengan siklus akuntansi, setelah penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, maka disusun laporan keuangan dengan mengambil data dari neraca saldo setelah penyesuaian.

Hasil akhir sistem akuntansi keuangan daerah adalah laporan keuangan daerah. Menurut Kepmendagri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, laporan keuangan pemerintah terdiri atas:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.
- 2) Neraca keuangan daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- 3) Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.
- 4) Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif analisis atau daftar terinci atas nilai

suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas.

4. Kas

Pengertian kas menurut Retno, Astuti dan Cornelio (2003:17), kas merupakan alat pertukaran yang diakui oleh masyarakat umum dan oleh sebab itu merupakan dasar yang kuat untuk dipakai sebagai alat pengukur kegiatan ekonomi didalam perusahaan.

5. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas

Sistem penerimaan kas menurut Winarno, (2004:42) meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan sampai peringkasan transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka memper-tanggungjawabkan anggaran yang berkaitan dengan penerimaan kas.

Dari pengertian sistem penerimaan kas yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem penerimaan kas merupakan suatu prosedur baik manual maupun terkomputerisasi untuk kegiatan penerimaan kas yang terjadi secara rutin.

a. Fungsi yang Terkait

Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas (Mulyadi, 2001:462):

- 1) Fungsi Penjualan
- 2) Fungsi Kas
- 3) Fungsi Akuntansi

b. Dokumen-dokumen yang Digunakan

Faktur Penjualan Tunai

1) Pita Register Kas (*cash register tape*)

2) Bukti Setor Bank

c. Catatan Akuntansi yang Digunakan Menurut Mulyadi (2001:469) catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas adalah:

1) Jurnal penerimaan kas digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya dari penjualan tunai.

2) Jurnal Umum Dalam transaksi penjualan tunai, jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual.

d. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem penerimaan kas menurut Mulyadi (2001:470) adalah :

1) Prosedur Penerimaan Kas

2) Prosedur Penyetoran Kas ke Bank

3) Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas

6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas dan prosedur akuntansi aset. Beberapa hal yang harus diperhatikan

dalam setiap prosedur tersebut adalah fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, laporan yang dihasilkan dan uraian teknis prosedur.

Tata cara atau prosedur pelaksanaan sistem penatausahaan keuangan sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah mengingat perkembangan volume kegiatan dari tahun ke tahun terus meningkat, yaitu dengan melakukan:

- a. Mempersiapkan buku-buku untuk pencatatan kegiatan pelaksanaan anggaran belanja
- b. Pencatatan dalam Buku Kas Umum dan Buku Kepala/Buku Pembantu
- c. Pengolahan tanda-tanda bukti untuk menyusun Surat Pertanggungjawaban
- d. Penyimpanan uang dan dokumen-dokumen.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah antara lain diperoleh dari transaksi:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Penerimaan Lain-lain

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat dilaksanakan dengan 3 (tiga) mekanisme/prosedur, yaitu:

- a. Pembayaran langsung melalui Bendahara Penerimaan.
- b. Pihak Ketiga/Wajib Pajak/Wajib Retribusi menyetorkan uang melalui Bendahara Penerimaan Pembantu, kemudian Bendahara Penerimaan Pembantu melaporkan kepada Bendahara Penerimaan.
- c. Pihak Ketiga/Wajib Pajak/Wajib

Retribusi menyetorkan uang melalui Bank Pemerintah yang Ditunjuk, Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan, dan/atau Kantor Pos.

7. Prosedur Penerimaan, Penyetoran dan Pencatatan Kas Pendapatan Asli Daerah

Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang dikelola dalam APBD. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Tata cara pelaksanaan penerimaan daerah yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 187-189. Secara administratif, Bendahara Penerimaan bertanggungjawab pada Kepala SKPD atas pengelolaan uang yang menjadi tugasnya, namun secara fungsional Bendahara Penerimaan SKPD bertanggung jawab pada PPKD.

Kajian Empiris

Sebagai bahan referensi dan rujukan terhadap analisis penelitian ini, maka disajikan beberapa hasil dari penelitian terdahulu diantaranya oleh Febriyanti S. Pamungkas (2015), dengan judul penelitian: Analisis Sistem Penerimaan Kas pada PT. Kalstar Aviation Cabang Berau.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam sistem akuntansi

penerimaan kas pada PT. Kalstar Aviation Cabang Berau meliputi:

- a. Prosedur penerimaan kas sudah efektif karena sudah sesuai dengan teori dari Mulyadi, bahwa transaksi penerimaan uang tidak terpusat pada satu bagian saja;
- b. Bagian yang terkait sudah efektif, karena sudah sesuai dengan teori Baridwan, bagian yang terlibat yaitu bagian piutang, bagian akuntansi dan bagian kas;
- c. Dokumen yang digunakan sudah efektif meskipun tidak selengkap sesuai dengan teori Mulyadi, dalam penggunaan dokumen sudah bernomor urut tercetak, yaitu invoice dan bukti bank masuk;
- d. Catatan akuntansi yang digunakan sudah efektif, karena sudah sesuai dengan teori Mulyadi, catatan yang digunakan yaitu jurnal bank *receive* dan rekonsiliasi bank;
- e. Pengendalian intern melibatkan beberapa bagian sehingga antara bagian saling mengontrol, adanya sistem otorisasi pada dokumen yang digunakan.

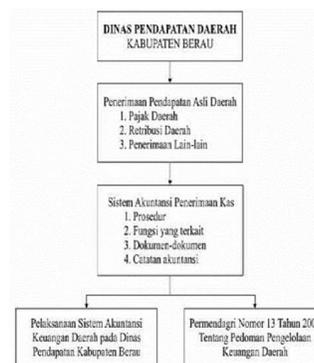
Petra Maria Simbolon (2009), dengan judul penelitian: Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 yang ditandai adanya pendapatan asli daerah yakni pajak, retribusi dan sumbangan pihak

ketiga maupun pengisian kas dari Bendaharaan Umum Daerah.

Penggunaan dokumen dan memfungsikan unit atau fungsi yang terkait telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin, walaupun kasir pembantu yang berada di kecamatan (desa) tidak difungsikan namun demikian hal tersebut tidak begitu mengganggu sistem yang ada.

Chartika Melisa Pangalila (2015), dengan penelitian mengenai: Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada DPPKAD Kabupaten Minahasa Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur penerimaan kas PAD pada Kabupaten Minahasa Utara sudah memadai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 namun masih terkendala dengan terbatasnya sumber daya manusia dalam menjalankan sebagian bidang dari DPPKAD Kabupaten Minahasa Utara. Pemerintah Minahasa Utara sebaiknya merekrut orang-orang yang mampu mengatasi permasalahan sumber daya manusia yang masih kurang di DPPKAD tersebut. Kerangka Pikir Penelitian Berikut ini penelitian ini:

Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian



Hipotesis

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut: “Diduga sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau belum sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

METODE PENELITIAN

A. Definisi Operasional

Definisi operasional dirumuskan untuk memberikan penjelasan mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian dan usaha pemecahan masalah sesuai dengan judul penelitian ini, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kas adalah alat-alat pembayaran yang diterima oleh umum, berupa uang tunai maupun bilget giro/cek, yang berada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau maupun yang disimpan di bank.
2. Penerimaan kas merupakan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang dikelola dalam APBD, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain.
3. Sistem informasi akuntansi penerimaan kas adalah merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan kas, yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) pada satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) dan

sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD).

4. Sistem informasi akuntansi penerimaan kas meliputi unsur-unsur pokok yaitu fungsi/pihak yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan dan prosedur yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.

B. Unit Analisis

Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa informasi deskriptif dan bukan data statistik/angka-angka antara lain berupa gambaran umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau, struktur organisasi, pelaksanaan sistem informasi akuntansi penerimaan kas, fungsi/ pihak yang terkait, dokumen-dokumen yang digunakan, catatancatatan akuntansi dan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan data primer, dimana sumber data secara

keseluruhan diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau yang menjadi unit analisis.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara. Yaitu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung pada nara sumber. Wawancara dilakukan kepada pejabat dan petugas yang berwenang untuk mendapatkan informasi mengenai obyek yang diteliti.
2. Observasi. Yaitu data diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan terhadap permasalahan yang akan diteliti.
3. Studi Kepustakaan. Yaitu mengumpulkan data yang bersumber dari buku-buku, literatur serta artikel di internet untuk digunakan sebagai kajian teoritis pada penelitian ini.
4. Dokumentasi. Yaitu mengumpulkan catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.

E. Alat Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggolongkan data yang diperoleh dan menguraikannya secara deskriptif,

serta mengambil suatu kesimpulan yang bersifat kualitatif dengan mendasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang menjadi alat analisis dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

Sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau meliputi:

1. Fungsi yang terkait

Fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi pendataan.
- b. Fungsi penetapan pajak.
- c. Fungsi perantara, fungsi ini di pegang oleh juru tagih.
- d. Fungsi pemegang kas.
- e. Fungsi pembukuan pajak, fungsi ini dipegang oleh bagian arsip.
- f. Fungsi penyimpan kas daerah, fungsi ini dipegang oleh bagian kas daerah.

2. Dokumen yang digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

- c. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- d. Surat Tanda Setoran (STS).
- e. Bukti Setor Penerimaan dari Kas Daerah.

3. Catatan Akuntansi

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

- a. Buku jurnal transaksi.
- b. Buku kas umum.

4. Prosedur yang Membentuk SIA Penerimaan Kas

Prosedur yang membentuk system informasi akuntansi penerimaan kas dari sektor pajak daerah di Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

- a. Prosedur pendataan.
- b. Prosedur penetapan pajak.
- c. Prosedur pembayaran pajak.
- d. Prosedur pembukuan.
- e. Prosedur penerimaan pada kas daerah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis

Berikut akan disampaikan analisis mengenai sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.

1. Fungsi yang terkait

Fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi pendataan yaitu bertugas untuk mendata wajib pajak.
- b. Fungsi penetapan pajak yaitu bagian yang tugasnya melakukan penetapan besarnya pajak yang harus disetorkan.
- c. Fungsi perantara yaitu bagian yang diberi tugas menghitung dan menyetorkan pajak wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak sendiri.
- d. Fungsi pemegang kas yaitu bagian yang bertugas menerima pembayaran pajak dari wajib pajak yang menyetorkan pajak terutang dan atau menerima setoran dari setiap petugas perantara (juru tagih) dari masing-masing kecamatan.
- e. Fungsi pembukuan pajak yaitu bagian yang bertugas mencatat transaksi penerimaan kas dari sektor pajak ke dalam catatan akuntansi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.
- f. Fungsi penyimpan kas daerah yaitu bagian yang bertugas menyimpan seluruh kas daerah yang berasal dari pendapatan daerah.

Dilihat dari fungsi yang terkait, sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari sektor pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dimana fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem informasi penerimaan kas telah dipisahkan masing-masing bagian mengikuti struktur organisasi yang telah ditetapkan.

2. Dokumen yang digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah dokumen hasil perekaman objek pajak yang kemudian digunakan wajib pajak untuk menghitung atau menyetorkan sendiri pajak terutang.
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh bagian penetapan pajak yang digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk membayar pajak. SKPD rangkap 3 untuk wajib pajak yang menyetorkan sendiri pajaknya, sedangkan SKPD untuk pajak yang disetorkan melalui juru tagih yaitu rangkap 6.
- c. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah dokumen yang digunakan oleh wajib pajak pribadi atau petugas perantara (juru tagih) untuk melakukan pembayaran pajak yang kemudian diserahkan kepada bendahara penerima kas. Surat Setoran Pajak Daerah ini rangkap 3.
- d. Surat Tanda Setoran (STS) adalah dokumen yang digunakan bendahara penerima pajak untuk menyetorkan seluruh uang hasil pemungutan pajak ke kas daerah.
- e. Bukti Setor Penerimaan dari Kas Daerah.
Daerah Kabupaten Berau sudah

sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Dokumen yang digunakan dalam pembayaran pajak, seperti Surat Ketetapan Pajak (SKPD) sudah bernomor urut tercetak. Penggunaan nomor urut tercetak lebih aman bila dibandingkan dengan penggunaan nomor urut yang ditulis tangan.

Hal ini dapat mencegah adanya pemalsuan dokumen. Disamping itu dokumen-dokumen tersebut telah diotorisasi dan diarsip dengan baik, apabila sewaktu-waktu diperlukan maka dapat ditelusuri dengan mudah dan dapat dipertanggung jawabkan oleh bagian yang bersangkutan.

3. Catatan Akuntansi yang digunakan

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

- a. Buku jurnal transaksi adalah catatan akuntansi yang berupa rekap jurnal transaksi yang digunakan bagian pembukuan untuk mencatat semua transaksi pembayaran pajak daerah.
- b. Buku kas umum adalah catatan akuntansi yang berupa buku besar yang digunakan bagian penerima setoran atau pemegang kas untuk mencatat penerimaan kas dari pembayaran pajak daerah.

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem informasi

akuntansi penerimaan kas dari sektor pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

4. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Penerimaan Kas

Prosedur yang membentuk sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari sektor pajak daerah di Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

- a. Prosedur Pendataan Pajak Prosedur pendataan pajak dilaksanakan oleh bagian pendataan pajak dibawah kepala seksi pendataan dan penetapan pajak.
- b. Prosedur Penetapan Pajak Prosedur ini dilaksanakan oleh bagian penetapan pajak dibawah kepala seksi pendataan dan penetapan pajak, yang bertanggung jawab menetapkan pajak daerah dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Bagi wajib pajak yang membayarkan pajaknya melalui petugas penagihan atau juru tagih, SKPD-nya rangkap 6, masing-masing diserahkan kepada :

- a) Lembar 1 :
- b) Diserahkan kepada wajib pajak.
- c) Lembar 2 :
- d) Diserahkan kepada juru tagih.
- e) Lembar 3 :
- f) Diserahkan kepada bagian pembukuan.
- g) Lembar 4, 5 dan 6 :
- h) Diserahkan kepada bagian bendahara pemegang kas.

Untuk pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak sendiri SKPD-nya rangkap 3, masing-masing diserahkan kepada:

- a) Lembar 1 : Diserahkan kepada wajib pajak.
- b) Lembar 2 : Diserahkan kepada bagian bendahara pemegang kas. Lembar 3 : Diserahkan kepada bagian pembukuan.
- c. Prosedur Pembayaran Pajak Prosedur pembayaran pajak dilaksanakan oleh bagian penagihan yaitu juru tagih dan bagian bendahara pemegang kas di bawah kepala bidang pajak daerah, yang bertanggung jawab:
 - a) Menarik pajak dari wajib pajak yang membayarkan
 - b) pajaknya melalui juru tagih.
 - c) Menerima dan mengarsip SKPD lembar 2.
 - d) Bagian bendahara pemegang kas menerima pembayaran dari wajib pajak yang membayarkan pajaknya sendiri atau yang dibayarkan melalui juru tagih.
 - e) Menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) lembar 4, 5 dan 6.
 - a) Mengeluarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) rangkap 3
 - b) Memeriksa kelengkapan dan menvalidasi dokumen SKPD lembar 4, 5 dan 6 beserta SSPD lembar 1.
 - c) Menyetorkan dan membuat Surat Setoran Pajak (STS) serta membuat laporan dalam buku kas umum.

- d) Mengarsip SSPD validasi lembar 1 dan SKPD validasi lembar 4, 5 dan 6.
- d. Prosedur Pembukuan Prosedur pembukuan dilakukan oleh bagian pembukuan di bawah kepala seksi pemungutan dan pembukuan pajak, yang bertanggung jawab:
 - a) Menerima SSPD lembar 3 dan buku kas umum dari bagian bendahara pemegang kas dan SKPD lembar 3 dari bagian penetapan pajak.
 - b) Menerima bukti setor berupa slip Ben 26 dari kas daerah.
 - c) Membukukan transaksi dalam buku jurnal. Membuat laporan dengan komputer. Terakhir, mengarsip SSPD lembar 3 dan SKPD lembar 3.
- e. Prosedur Penerimaan pada Kas Daerah, yang bertanggung jawab :
 - a) Menerima Surat Setoran (STS) beserta sejumlah uang hasil penerimaan pajak daerah.
 - b) Mengitung jumlah setoran penerimaan pajak.
 - c) Mencatatnya dan kemudian mengeluarkan bukti setor berupa slip Ben 26.
 - d) Membuat laporan penerimaan kas daerah.

Pembahasan

Berdasarkan analisis di atas terdapat beberapa hal dari hasil perbandingan sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dengan sistem informasi akuntansi yang baik menurut Permendagri Nomor

13 Tahun 2006, hal tersebut akan dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 1. Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau

No.	Permendagri No. 13/2006	SIA DISPENDA	Kesimpulan
1.	Adanya pemisahan masing-masing fungsi yang terkait	Telah dilaksanakan pemisahan fungsi-fungsi yang terkait	Sesuai
2.	Adanya dokumen sebagai bukti transaksi penerimaan kas	Dokumen yang digunakan sudah bernomor urut tercetak dan diotorisasi dengan baik	Sesuai
3.	Adanya catatan akuntansi	Catatan yang digunakan seperti jurnal umum dan jurnal penerimaan kas	Sesuai
4.	Adanya jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas	Prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas telah dijalankan dengan baik	Sesuai

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas sudah sesuai dengan standar informasi akuntansi, seperti buku jurnal umum yang merupakan buku catatan pertama yang mencatat kronologis terhadap semua transaksi penerimaan kas. Berdasarkan Tabel 1 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menolak hipotesis dalam penelitian ini karena terbukti bahwa sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari evaluasi yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa menolak hipotesis dalam penelitian ini karena terbukti bahwa sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Terdapat kelebihan dalam pelaksanaan sistem informasi akuntansi penerimaan kas, yaitu : penggunaan dokumen yang bernomor urut tercetak dan dokumen tersebut telah diarsip dengan baik oleh petugas yang berwenang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan, penulis menyarankan agar pelaksanaan sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari sektor pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau terus dilaksanakan secara kontinyu dan untuk menunjang sistem tersebut diperlukan pegawai dengan SDM (sumber daya manusia) yang baik dan profesional, dimana hal tersebut dapat diciptakan melalui perbanyak workshop dan pelatihan mengenai sistem yang digunakan serta pengendalian intern yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- _____. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang *Pedoman Pengurusan,*

Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

- Arikunto, Suharsini. 1997. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Baridwan, Zaki. 2008. *Intermediate Accounting*. BPFE, Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Buku 1, Edisi 3. Erlangga, Jakarta.
- Bodnar, George H. dan William S. Hapwood. 2000. yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf dan Rudi M. Tambunan. Salemba Empat, Jakarta.
- Gade, Muhammad. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Jogiyanto, HM. 2003. *Sistem Teknologi Informasi*. ANDI, Yogyakarta.
- Jusuf, Al. Haryono. 2001. *Dasar-dasar Akuntansi*. YKPN, Yogyakarta.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat, Yogyakarta.
- Pamungkas, Febriyanti S. 2015. *Analisis Sistem Penerimaan Kas pada PT. Kalstar Aviation Cabang Berau*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redeb, Berau.
- Pangalila, Chartika Melisa. 2015. *Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada DPPKAD Kabupaten Minahasa Utara*. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

